

Makna Dibalik Tambur Peh Cun dalam Masyarakat Tionghoa Benteng: Sebuah Analisis Kultural Berdasarkan Teori Yin-Yang

Michael Hari Sasongko¹; Dody Candra Harwanto²; Alfa Kristanto³

^{1,2,3}Program Studi Musik Gereja, Sekolah Tinggi Teologi Abdiel
Jalan Diponegoro 233, Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Indonesia

(*)✉ (e-mail) mharisasongko29@gmail.com¹, dcharwanto@gmail.com², alfaomega.kristanto@gmail.com³

Abstrak

Secara historis, masyarakat Tionghoa Benteng adalah komunitas yang termarginalkan. Eksistensinya di Indonesia tidak lepas dari diskriminasi yang disebabkan oleh distorsi politik, sejak zaman pendudukan Belanda, Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Hal itu mengakibatkan kemiskinan di berbagai aspek. Sejak dicabutnya Inpres No. 14/167 dan diganti dengan Keppres No. 6/2000, komunitas ini bebas mengekspresikan bentuk-bentuk kebudayaannya. Hal itu dibuktikan dengan adanya tradisi tambur Peh Cun dalam Festival Perahu Naga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna di balik tradisi Tambur Peh Cun melalui teori Yin Yang dan berusaha memperoleh teori baru tentang hakikat Peh Cun. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Berdasarkan analisis terungkap bahwa Peh Cun atau balap perahu tersebut tidak semata-mata hiburan, bentuk pariwisata, atau kesenian biasa, melainkan bermakna ideologis, yakni berisi harapan dan cita-cita akan persamaan hak dan kewajiban seperti warga negara Indonesia pada umumnya dan mendapat perlakuan yang adil.

Kata kunci: tionghoa benteng; ideologis; peh cun; kemiskinan; yin yang.

Abstract

Historically, the Benteng Chinese community was a marginalized community. Its existence in Indonesia cannot be separated from discrimination caused by political distortions, since the Dutch occupation, the Old Order, the New Order, until the Reformation Order. This results in poverty in various aspects. However, since the revocation of Presidential Instruction No. 14/167 revoked and replaced with Presidential Decree No. 6/2000, this community is free to express its cultural forms. This is evidenced by the existence of the Peh Cun drumming tradition in the Dragon Boat Festival. This study aims to reveal the meaning behind the Tambur Peh Cun tradition through the theory of Yin Yang and try to obtain a new theory about the essence of Peh Cun. That means this research uses a qualitative. Based on this analysis, it is revealed that Peh Cun or boat racing is not merely entertainment, a form of tourism, or ordinary art, but has an ideological meaning, which contains hopes and aspirations for equal rights and obligations as Indonesian citizens in general and treatment fair.

Keywords: benteng chinese; ideological; peh cun; poverty; yin yang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2022 Michael Hari Sasongko; Dody Candra Harwanto; Alfa Kristanto

Proses Artikel

Diterima 22-06-2022; Revisi 18-12-2022; Terbit Online 27-12-2022

Pendahuluan

Tambur Peh Cun adalah tradisi berupa festival yang masih diselenggarakan di masyarakat Tionghoa Benteng, Tangerang, Banten, hingga saat ini. Istilah Peh Cun dalam bahasa Hok-kian berarti “balap perahu”; berasal dari dua kata “peh” berarti “dayung” atau “mendayung”, dan “cun” yang berarti “perahu”. Tambur Peh Cun atau yang juga disebut guo, merupakan iringan lomba perahu naga di sungai Cisadane dan merupakan salah satu rangkaian dalam upacara Peh Cun yang selalu diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 dalam sistem kalender Kong Hu Cu. Menurut Rosyadi (2010), perayaan Peh Cun di sungai Cisadane merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. Eksistensi tradisi Peh Cun didasarkan pada cerita tentang perahu naga Empeh Pe Cun yang disumbang oleh Kapitan Oey Khe Tay kepada Kelenteng Boen Tek Bio pada abad ke-19. Tahun 1911, perahu tersebut ikut dalam lomba perahu Peh Cun namun mengalami kecelakaan sehingga patah dua, namun tetap melanjutkan perlombaan dan menang. Hingga saat ini sisa-sisa perahu tersebut masih ada dan disimpan oleh keturunan pemimpin Kelenteng Boen Tek Bio.

Selain guo, dalam festival perahu naga tersebut, digunakan juga instrumen gambreng (luo). Luo terbuat dari lempengan besi dengan bentuk bulatan dan di tengahnya dibuat menonjol (pencon). Bunyi dihasilkan dengan cara menabuh pencon ini. Menurut catatan Nasir (2021), pada masa kekaisaran Cina, Peh Cun disebut Cao Gui dan dipergunakan sebagai iringan perang. Cao Gui digunakan untuk membakar semangat prajurit untuk maju ke medan pertempuran, sedangkan luo dibunyikan sebagai tanda instruksi agar pasukan mundur dari medan pertempuran. Dalam konteks balap perahu di sungai Cisadane kedua alat musik ini dibunyikan secara berpasangan dan masyarakat Tionghoa Benteng menyebutnya sebagai “musik gambreng”.

Walaupun festival Peh Cun ini diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, seperti di Semarang dan Yogyakarta, festival ini lebih identik dengan tradisi masyarakat Tionghoa Benteng. Tjwan (2008) mencatat, istilah “Tionghoa Benteng” adalah eufimisme dari “Cina Benteng”. Tionghoa Benteng adalah sebutan bagi peranakan Tionghoa di Tangerang oleh kaum urban di Jakarta. Dulu, kota Tangerang disebut “kota Benteng” oleh penduduk di sekitar Tangerang sebab pernah berdiri sebuah benteng Belanda. Di sisi lain sebutan “Tionghoa Benteng” sebetulnya bernada peyoratif, maka komunitas ini sering disebut juga sebagai “Tionghoa udik” atau “Tionghoa miskin.” Sebutan ini bersifat paradoks, sebab pada umumnya etnis Tionghoa selalu lekat dengan kemakmuran dan kekayaan, walaupun sama-sama berstatus “Tionghoa perantauan”. Secara historis istilah “tionghoa” sendiri memiliki sejarahnya sendiri, yakni ketika Kaisar Dinasti Wei yang berkebangsaan Xianbei memerintahkan pengubahan marga etnis Xianbei ke dalam marga Tionghoa (Akbar & Darmawan, 2022; Chunjiang, 2002).

Status kemiskinan dalam masyarakat Tionghoa Benteng ini mengacu pada definisi “miskin” yang sesungguhnya, yang mencakup banyak aspek. Purwanto (2012) mendeskripsikan bahwa kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat Tionghoa Benteng mencakup kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan individual. Kemiskinan struktural terjadi karena distorsi politik yakni kemiskinan dalam memperoleh kesempatan-kesempatan dan mengakses sumber daya yang ada untuk mendapatkan pendapatan dan keadaan yang lebih baik oleh karena sistem pemerintahan yang diskriminatif. Kemiskinan kultural terjadi karena terjadi penyimpangan atau berkurangnya kualitas nilai budaya dari

budaya masyarakat asli yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya, atau yang menurut bahasa Lewis (1998) *“they are psychologically unready to take full advantage of changing or improving opportunity that may develop in their lifetime.”* Yang terakhir kemiskinan individu. Tipe kemiskinan semacam ini muncul dengan adanya rasa tidak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri. Jika ini terjadi terus-menerus, maka melahirkan defisiensi-defisiensi. Defisiensi individu dapat didefinisikan sebagai kekurangan-kekurangan yang melekat pada individu untuk dapat mengembangkan diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Penelitian tentang kebudayaan Tionghoa sudah banyak dilakukan mulai dari budaya, seni, dan cara hidup dalam bermasyarakat (Akbar & Darmawan, 2022; Christian, 2017; Meyer, 2021; Mutia, 2019; Srimulyani et al., 2019).

Tujuan artikel ini adalah untuk melihat lebih dalam tentang sebuah makna di balik fenomena tambur Peh Cun yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Tionghoa Benteng. Selama ini festival perahu naga di sungai Cisadane senantiasa dipandang sebagai sarana hiburan dan dikaitkan dengan aspek pariwisata. Pandangan semacam ini wajar sebab festival ini memang dilaksanakan di sungai Cisadane yang ditonton banyak orang dan dianggap semata-mata sebagai “balap perahu”. Melalui analisis berdasarkan teori Yin-Yang, diharapkan dapat mengungkap lebih dalam makna yang terkandung di balik festival Peh Cun: bahwa Peh Cun bukan sekadar hiburan, atau semata-mata salah satu bentuk pariwisata yang selama ini dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, atau sesuatu yang eksotis dan unik belaka, melainkan mencerminkan dunia batin masyarakat Tionghoa Benteng serta mengandung ideologi yang selama ini diimpikan dan dicita-citakan selama berpuluh, bahkan ratusan tahun oleh komunitas Tionghoa Benteng.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tujuan penelitian ini berupaya mengungkap makna di balik fenomena, berusaha menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, berorientasi pada proses dan menggambarkan realitas yang kompleks seperti pengalaman, struktur kehidupan (Ichsan & Ali, 2020; Sugiono, 2012). Hubungan antar-gejala dilakukan dengan melihat hubungan-hubungan tersebut dari perspektif tertentu. Gejala-gejala tersebut berasal dari berbagai sumber seperti hasil penelitian, buku-buku, dan artikel jurnal. Dalam konteks penelitian kualitatif, antara gejala satu dengan yang lain secara sekilas acapkali dipandang tidak terdapat/terjadi hubungan sehingga membutuhkan pemahaman (*verstehen*) yang lebih dalam setelah mengalami reduksi data (Hidayatullah, 2020). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti dalam menggali dan mengungkapkan data dan informasi (Patilima, 2007). Analisis menggunakan teori Yin-Yang sebagai ‘pisau analisis’. Lokasi penelitian berada di seputaran sungai Cisadane, Tangerang, Banten (dekat vihara Boen Tek Bio).

Hasil dan Pembahasan

Latar belakang sejarah Tionghoa Benteng tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik Indonesia sendiri yang terbagi menjadi empat periode, yakni periode politik kolonial Belanda, politik Orde Lama, Politik Orde Baru (Era Suharto), dan politik Orde Reformasi. Keempat

periode ini turut serta dalam mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa Benteng. Secara umum, periode-periode politis tersebut turut ambil bagian dalam perlakuan diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa Benteng, dan perlakuan tersebut adalah penyebab/faktor utama penyebab kemiskinan.

Periode Politik Kolonial Belanda

Berdasarkan catatan Lohanda (2007), VOC telah menerapkan sistem administrasi pendaftaran kepedudukan (state gazzete) yang didasarkan pada estnisitas dan agama. State Gazzete No. 1849 diberlakukan untuk orang Eropa, State Gazsete No. 1917 untuk orang Tionghoa, State Gazzete No. 1933 untuk masyarakat indigenous non-Kristen (Boemi Poetera), State Gazzete No. 1933 untuk masyarakat indigenous yang beragama Kristen. Kelak sistem yang terakhir ini menjadi akar masalah kewarganegaraan, terutama berpengaruh terhadap orang-orang Tionghoa. Selain itu Belanda juga membuat kampung-kampung berdasarkan etnis masing-masing, misalnya Kampung Jawa, Kampung Bali, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Melayu, Kampung Bugis, Kampung Makasar, dan Kampung Manggarai. Tangerang juga tidak luput dari pengelompokan etnis itu, yakni sebagai suatu wilayah yang disebut Wester-kwartier (Lohanda, 2007b, 2007a).

Dalam proses memudahkan pengelolaan kampung-kampung tersebut, Belanda mengangkat Kapitan. Kapitan Tionghoa pertama bernama Souw Beng Kong, diangkat tanggal 18 Agustus 1620. Tugas utama Souw Beng Kong adalah menarik pajak orang-orang Tionghoa. Bentuk diskriminasi Belanda terhadap orang Tionghoa terjadi ketika orang Tionghoa yang berumur 16 sampai 60 tahun wajib membayar pajak 1.5 real per kepala, akan tetapi peraturan ini tidak diberlakukan kepada orang pribumi atau Tionghoa yang beragama Islam. Souw Beng Kong diberi kekuasaan menangkap mereka yang tidak membayar pajak untuk diserahkan kepada Belanda. Secara faktual Souw Beng Kong lebih merupakan 'centeng' ketimbang kapitan (Setiono, 2008)

Tahun 1644 terjadi pergolakan politik di negeri Tiongkok. Dinasti Ming dikalahkan oleh Dinasti Qing (Mancu). Pengikut Ming melarikan diri. (Purwanto, 2012) mencatat, terdapat sedikitnya 4000 orang dari Tiongkok yang mendarat di Batavia. Di tahun 1719 meningkat menjadi 7.550, dan tahun 1739 mencapai 10.474 orang. Kemungkinan besar jumlahnya melebihi angka ini sebab banyak orang Tionghoa yang masuk ke Batavia secara ilegal (Dharmowijono, 2013). Meningkatnya populasi ini menjadi persoalan sosial baru. Banyak orang Tionghoa yang menganggur dan melakukan pencurian dan perampokan di Batavia. Hal ini membuat pemerintah Belanda dan pribumi geram. Tanggal 8-10 Oktober 1750 terjadilah *Chineesche Troubelen*, atau "pembantaian orang-orang Tionghoa". Serdadu Belanda, preman, dan orang-orang Bumi Putera menghabisi etnis Tionghoa dalam waktu 24 jam. Rumah-rumah orang Tionghoa dijarah dan dibakar, (Setiono, 2008) mencatat, sedikitnya 10.000 orang Tionghoa dibunuh dengan kejam dalam satu hari. Dari peristiwa ini beberapa (sisa) orang Tionghoa yang melarikan diri ke udik-udik sebelah Barat Batavia, yakni Tangerang dan menetap di sana dari generasi ke generasi.

Periode Politik Orde Lama

Pembantaian terhadap etnis Tionghoa bukan hanya terjadi di zaman Belanda. Di zaman Orde Lama, tanggal 3 Juni 1946 terjadi pembantaian besar-besaran etnis Tionghoa yang disulut isu bahwa orang-orang Tionghoa adalah antek NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Mereka terbukti menurunkan bendera merah putih, menembaki anak-anak kecil dan orang tua, merampok di sebelah Barat sungai Cisadane, dan menjadi mata-mata NICA untuk mencari pemimpin Laskar Rakyat dan Pemuda. Menurut catatan Setiono (2008), berdasarkan berita New York Times edisi 6 Juni, sedikitnya 600 orang Tionghoa dibantai, dan pembantaian itu masih berlangsung hingga 8 Juni 1956. Pembantaian ini meluas sampai Sabi (sekarang Karawaci).

Selain pembantaian, masalah kewarganegaraan juga muncul di era Soekarno. Bulan Agustus 1953, Sunario, seorang tokoh PNI yang juga Menteri Luar Negri saat itu, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan dalam bentuk RUU. Motif dari RUU ini adalah menjadikan sebanyak mungkin orang Tionghoa menjadi warga negara asing (Setiono, 2008), sehingga dapat mengambil alih dominasi perdagangan, ekspor-impor, transportasi, penggilingan beras, dan perdagangan eceran dari orang-orang Tionghoa, baik yang totok maupun peranakan. Dampaknya, banyak orang Tionghoa yang menjadi warga negara asing, walaupun akhirnya RUU tersebut dibatalkan berkat jasa Lie Kiat Teng yang menjadi menteri di dalam kabinet presiden Soekarno. Mereka yang bertahan di Indonesia menjadi *stateless* (tidak memiliki kewarganegaraan).

Stigma negatif terhadap etnis Tionghoa tidak hanya sampai di situ. Peristiwa G30S/PKI memberi warna tersendiri bagi eksistensi etnis Tionghoa. Di masa pemerintahan presiden Soekarno, ideologi politik Indonesia terbagi menjadi dua yaitu aliran kiri dan kanan. Pada tahun 1950 aliran kiri dipimpin oleh Soekarno dan Partai Komunis, sedangkan aliran kanan didukung oleh militer dan muslim. Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang Tionghoa di Indonesia, yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan, mendukung Soekarno dan Partai Komunis. Inilah yang menyebabkan munculnya gerakan anti-China setelah pecahnya G30S/PKI. Stigma yang berkembang adalah orang-orang Tionghoa adalah komunis karena berorientasi pada politik "Poros Jakarta-Peking".

Periode Politik Orde Baru (Era Suharto)

Setelah pecah peristiwa G30S/PKI, Suharto menjabat presiden RI, dan Soekarno pun dilengserkan, maka kebijakan rezim baru ini terhadap warga Tionghoa juga berubah. Mereka diminta mengubah nama Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia, sebagai bukti keseriusan mereka ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia berdasarkan Keppres No. 127/U/Kep/12/1966. Kebudayaan Tionghoa secara praksis dilarang berdasarkan Inpres No. 14/1967. Isi Inpres tersebut adalah bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa yang terwujud dalam upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh diselenggarakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Dengan demikian perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk Imlek, Capgomeh, Peh Cun, barongsai, dan sebagainya dilarang dilakukan di tempat terbuka. Buntut dari Inpres ini adalah mereka dilarang juga menyelenggarakan sekolah-sekolah Tionghoa, dan penggunaan aksara Tionghoa yang termuat dalam Inpres No. 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988.

Semua dilakukan lantaran di masa Orde Baru Indonesia segera memasuki era ‘tinggal landas’. Semua dilakukan demi proyek “pembangunan”. Segala kritik dan permasalahan sosial sedini mungkin harus “diamankan”.

The fourth Kongres Kebudayaan (Cultural Congress) of 1991, meant to pave the way for the era when the country was expected to tinggal landas, to ‘take off’, was a one-shot affair where certain prominent luminaries uttered interesting criticism without, however, inspiring like a sustained or sustainable public discourse. The state-independent middle class appear mute (Mulder, 2000).

Di sisi lain, Lindsey & Pausacker (2005) dan Setiono (2008) mencatat bahwa setiap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan anak-anaknya harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri RI (SKB 0-UM.09.30-80, No. 42). Ditambah lagi kebijakan di bidang pendidikan yang hanya boleh menyediakan 40 persen tempat duduk per kelas di sekolah negeri, berdasarkan Inpres No. 37, tahun 1967. Pencantuman nomor di dalam KTP dan *passport* juga menunjukkan diskriminasi tersendiri. Nomor KTP diawali dengan angka nol, untuk membedakan mereka dengan orang Indonesia pribumi. Akan tetapi peraturan hanya sebatas tulisan. Dalam kenyataannya sulit sekali anak beretnis Tionghoa yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Untuk mendapatkan SBKRI juga bukan perkara mudah. Mereka acapkali jadi “bulan-bulanan” aparat dari tingkat RT sampai kecamatan.

Periode Politik Reformasi

Peristiwa reformasi di tahun 1998 membawa angin segar bagi etnis Tionghoa, walaupun di masa awal periode ini mereka adalah kelompok yang paling teraniaya. Dalam tragedi Mei 1998, sejarah penindasan sejak zaman Belanda terulang: rumah-rumah dibakar, toko-toko dijajah, laki-laki dibunuh, perempuan-perempuan diperkosa. Peristiwa kelam ini sungguh memilukan. Namun dengan bergulirnya waktu, banyak pribumi yang menyadari bahwa sikap mereka tidak adil terhadap etnis Tionghoa. Salah satu tokohnya adalah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dengan terpilihnya ia sebagai presiden RI, maka Inpres No. 14/167 dicabut dan diganti dengan Keppres No. 6/2000. Isi Keppres ini adalah membebaskan etnis Tionghoa melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan mereka. Hari raya keagamaan, tradisi leluhur, dan bahasa Mandarin boleh diselenggarakan, bahkan Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Istilah “WNI Keturunan” secara gradual mulai diganti menjadi “warga negara Indonesia” dan diakui sebagai salah satu etnis Indonesia ketimbang etnis asing (Efferin & Pontjoharyo, 2006).

Simbol keterbukaan di atas, menjadikan tradisi Peh Cun diperbolehkan untuk diselenggarakan. Mereka tanpa rasa takut dan khawatir menyelenggarakan festival perahu naga ini di sungai Cisadane secara terbuka dan ditonton ribuan orang di pinggir sungai. Tidak dapat dipungkiri Peh Cun menjadi hiburan unik tersendiri bagi masyarakat di sekitar sungai Cisadane, selain menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Perlakuan diskriminatif terhadap Tionghoa Benteng telah berlangsung selama ratusan tahun. Walaupun kebijakan Gus Dur sangat membahagiakan mereka, bukan berarti dengan serta merta mereka menjadi warga negara seperti yang lain. Semua itu membutuhkan proses yang panjang. Dampak yang terlihat adalah fenomena kemiskinan yang telah terbentuk di

masyarakat ini. Dengan kata lain, kemiskinan, masyarakat rendahan masih menjadi stereotip komunitas Tionghoa Benteng.

Aspek Musikologis Tambur Peh Cun

Hadirnya tambur dalam festival lomba perahu merupakan salah satu dari rangkaian upacara Peh Cun. Sehari sebelum lomba dayung terdapat upacara pembakaran replika perahu dan memandikan perahu yang dianggap keramat setelah memohon 'izin' kepada arwah para leluhur. Pada tengah malam diadakan doa yang ditujukan kepada Twan Yang, yang diselingi dengan pertunjukan barongsai dan kesenian gambang kromong. Pagi harinya sembahyang ditujukan kepada dewa Khut Guan. Sebelum diadakan lomba balap perahu, diadakan acara tabur bunga, pelebaran kuecang dan bacang ke sungai, mendirikan telur dan melepas bebek (Nasir, 2021)

Perahu yang digunakan adalah perahu naga. Bagian depan perahu ini dihiasi dengan motif kepala naga, dan bagian belakang bermotif ekor naga. Motif naga ini memiliki makna tersendiri. Pada zaman dahulu bangsa Tionghoa menganggap naga sebagai hewan yang sangat kuat, mulia dan sangat misterius. Naga bisa berenang di laut dan mampu memanggil angin dan hujan. Makhluk mitos ilahi ini dipercaya membawa kemakmuran, nasib baik, dan perlindungan ilahi, serta merupakan simbol kekuasaan, kehebatan, keberanian, kebangsawanan dan keilahian. Naga juga menjadi simbol kekuasaan kekaisaran. Tubuh kaisar disebut "tubuh naga" dan wajahnya disebut "wajah naga". Ia tidur di atas "ranjang naga", dan keturunannya disebut "keturunan naga" (Fang, 2012; Xiaoxiang, 2001).

Pada saat pelaksanaan lomba, dua alat musik yang ada dalam setiap perahu yaitu tambur Peh-cun dan gembreg dibunyikan sebagai pertanda atau aba-aba. Sebetulnya selain perahu naga juga terdapat perahu pakpak. Perahu ini adalah perahu biasa tanpa ada hiasan apapun. Secara organologis, suara yang dihasilkan dari alat perkusi ini berasal dari membran yang terbuat dari kulit hewan (semacam bedug) yang direntangkan pada benda berbentuk bulat terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai ruang resonansi. Untuk menghasilkan bunyi, permukaan membran tersebut ditabuh dengan stik atau tongkat kayu. Jadi tambur Peh Cun adalah musik perkusi dalam tradisi musik Cina yang digunakan dalam upacara Peh Cun. (Nasir, 2021) mencatat, Penggunaan tambur dalam festival perahu naga memiliki tiga tahap, yakni tahap persiapan, tahap perlombaan, dan tahap kemenangan. Masing-masing tahap memiliki pola ritme tersendiri yakni Pola I, Pola II, dan Pola III.

Pada tahap persiapan, para peserta mempertahankan posisi perahunya pada garis start. Perahu didayung setelah mendengar peluit dari wasit, dengan iringan tambur dan gembreg dengan tempo lambat. Pada tahap ini suasana tenang dan santai, namun mereka sebetulnya sedang mempersiapkan energi. Pola irama tambur pada tahap persiapan dapat dilihat pada gambar 1.

Pola I

Pola lambat

The image shows two systems of musical notation for 'Pola I'. Each system consists of two staves: 'Gembreg' (top) and 'Tambur' (bottom). The first system is titled 'Pola lambat' and the second system is titled '9'. Both systems are in 2/4 time. The Gembreg staff uses a single melodic line with quarter notes. The Tambur staff uses a rhythmic accompaniment with eighth notes and rests.

Gambar 1. Website Musikolastika

Pada tahap perlombaan, perahu melaju dengan cepat, diiringi suara tambur dan gembreg. Pola tabuhan yang dipakaipun berbeda dengan tahap persiapan. Oleh karena melaju dengan cepat, penuh energi, dan semangat, maka disebut “pola *race*”. Pola *race* pada tahap perlombaan dapat dilihat pada gambar 2.

Pola II

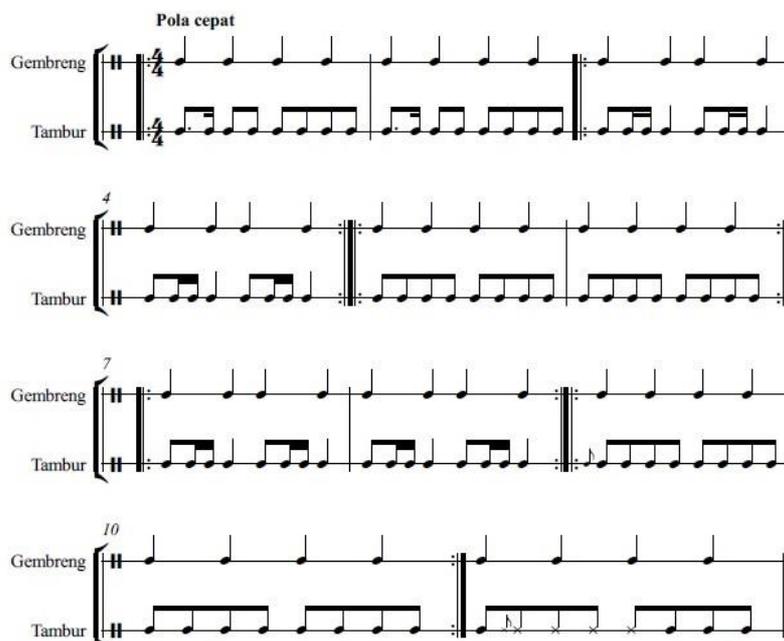
Pola sedang

The image shows two systems of musical notation for 'Pola II'. Each system consists of two staves: 'Gembreg' (top) and 'Tambur' (bottom). The first system is titled 'Pola sedang' and the second system is titled '5'. Both systems are in 2/4 time. The Gembreg staff uses a single melodic line with quarter notes. The Tambur staff uses a rhythmic accompaniment with eighth notes and rests.

Gambar 2. Pola Irama Tambur pada Tahap Perlombaan

Tahap ketiga adalah tahap kemenangan yakni setelah perahu-perahu peserta lomba hampir mendekati garis *finish*. Pola tabuhannya berubah lagi dari sebelumnya. Memiliki tempo sedang. Pola ini disebut juga sebagai “pola tabuhan kemenangan” yang membentuk suasana agung. “Pola tabuhan kemenangan” dapat dilihat pada gambar 3.

Pola III



Gambar 3. Pola Irama Tambur pada Tahap Kemenangan

Teori Yin-Yang

Menurut alam pikiran Cina, sifat dan gejala sesuatu dalam alam semesta ini mempunyai dua ‘muka’ yang bertentangan. Yin dan Yang adalah dua hal yang bertentangan itu. Yin dan Yang saling bertentangan, tetapi juga saling membentuk. Keduanya memiliki sifat dan kerja yang saling bertentangan, tetapi dalam ketidaksamaannya, dalam pertentangannya itu, keduanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain; keduanya merupakan sebuah kesatuan; sebuah hubungan pertentangan dan kesatuan atau “oposisi yang komplementer” (Kusumohamidjojo, 2010). Penilaian Yin dan Yang tidaklah mutlak, tetapi mengikuti keadaan dan sudut pandang. Sesuatu yang di atas dinilai sebagai Yang, akan tetapi bilamana ada yang lebih atas dari itu, maka benda semula kini berubah menjadi Yin dan yang lebih di atas itu adalah Yang. Inilah “*dualistic nature of Yin and Yang*” (Hetherington, 2014; Wang, 2005). Tidak ada sesuatu yang mutlak. Tidak ada Yin yang murni maupun Yang yang murni.



Gambar 4. Yin dan Yang

Warna putih sebagai Yang, dan hitam sebagai Yin. Dalam hitam terdapat putih dan dalam putih terdapat hitam. Itu berarti di dalam Yin ada Yang, dan di dalam Yang terdapat Yin. Yin dan Yang membentuk sebuah kesatuan dan keseimbangan yang bersifat holistik (Fang, 2012; Gopalakhrisnan, 2013). Jika terdapat Yin dan Yang yang berlebihan maka menimbulkan ketidakseimbangan. Hilangnya keseimbangan akan menimbulkan kondisi abnormal. Oleh karena itu, jika yang berlebihan dilemahkan dan yang lemah dikuatkan, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Bilamana pada suatu saat Yin atau Yang menjadi berlebihan atau melemah, maka pada batas maksimal ia akan berubah membentuk atau memperlihatkan sifat yang bertentangan dengan dirinya. Jika Yin sebagai misal, mencapai batas maksimal, ia akan memperlihatkan sifat dari Yang; begitu pula dengan Yang, akan membentuk sifat Yin. Gambaran Yin dan Yang dalam alam semesta dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Gambaran Yin dan Yang dalam Alam Semesta

Yin	Terjajah	Gelap	Miskin	Dingin	Perempuan	Sakit	Lemah
Yang	Merdeka	Terang	Kaya	Panas	Laki-laki	Sehat	Kuat

Hetherington (2014) menegaskan, bahwa Yang lebih bersifat maskulin dan Yin bersifat feminim, "*Yang is commonly expressed as extreme heat, energy, expansion, sun, male energy, and so forth. Yin is commonly expressed at cold, passive, moon, female energy, and so forth.*" Penggunaan Yin dan Yang untuk menjelaskan segala sifat dan gerak perubahan sesuatu hal disebut sebagai *Teori Yin-Yang*. Teori ini dipakai di banyak aspek kehidupan, termasuk ilmu kedokteran Cina, persiapan penguburan, plakat leluhur, menyapu makam, kondisi alam baka, dan pemberian nama seseorang. Menurut tradisi Cina, nama juga memiliki unsur Yin dan Yang. Pada saat memberi nama bagi anaknya seseorang penting menyeimbangkan unsur Yin dan Yang. Jika huruf memiliki jumlah guratan yang ganjil, berarti huruf ini digolongkan sebagai Yang, jika jumlahnya genap berarti Yin (Xiaoxiang, 2001; Xie, 2021; Han, 2020).

Secara dinamis Yin dan Yang terus bergerak. Gerakan itu disebabkan oleh *qi* atau "energi murni" (Kusumohamidjojo, 2010; Chen, 2018). Menurut filosofi Cina, Chi merupakan unsur utama pembentuk semesta melalui dialektika Yin dan Yang, "*Philosophically, in ancient Chinese metaphysics, Yin and Yang refers to two cosmological forces, called Chi, which is rhetorically a kind of cosmic breath, circulating in universe,*" (Ningchuan, 2020, 38). Di dalam ilmu kedokteran Cina, *qi* ini bergerak berdasarkan meridian-meridian (*vessels*) yang terdapat di dalam tubuh manusia. Terdapat 12 meridian umum dan delapan meridian istimewa yang bergerak di dalam organ-organ manusia. Dasar pengobatan Cina (*traditional Chinese medicine*) terletak pada upaya penyeimbangan *qi* melalui meridian-meridian tadi, berupa penguatan atau pelemahan. *Qi* yang seimbang dalam tubuh manusia mengindikasikan tubuh yang sehat, sebaliknya *qi* yang tak seimbang membuat tubuh menjadi sakit (Mann, 1964; Ming, 1964).

Dasar-dasar pengobatan Cina ini dapat menjadi patokan dalam upaya penyeimbangan yang bersifat sosial. Dalam konteks sosial, kondisi miskin berarti Yin dan makmur berarti Yang.

Penindasan adalah Yin dan kebebasan adalah Yang. Ilegal adalah Yin dan legal berarti Yang. Tidak aman berarti Yin, sedangkan aman berarti Yang. Sentosa adalah Yin, dan bencana adalah Yang. Oleh karena di dalam Yin ada Yang, dan di dalam Yang terdapat Yin, maka secara sosial dapat digambarkan: di dalam masyarakat yang makmur, ada warga negara yang miskin, dan di dalam negara yang miskin terdapat warga negara yang makmur. Di dalam negara yang otoriter terdapat demokrasi, di dalam negara demokrasi terdapat sikap otoriter, begitu seterusnya. Upaya penyeimbangan berarti upaya membangun sedikit mungkin kesenjangan secara sosial, sebab tidak ada masyarakat yang anggotanya makmur semua, atau miskin semua.

Makna Di Balik Tambur Peh Cun

Secara historis, selama ratusan tahun masyarakat Tionghoa Benteng mengalami diskriminasi akibat distorsi politik yang berdampak pada kemiskinan dari berbagai aspek. Berdasarkan teori Yin-Yang, keadaan ini berarti dalam kondisi Yin. Yin yang berlebihan ini membuat kondisi masyarakat yang “sakit”, “lemah”, “tidak bergairah”, kalau tidak boleh dibilang “kalah”. Yin yang berlebih ini pada gilirannya merusak organ-organ sosial lainnya seperti munculnya demoralisasi, rasa putus asa, kemalasan, kekebalan, hopeless, apatis, dan perasaan rendah diri. Mereka menganggap diri mereka “liyan”, other, terpisah secara sosial dari warga negara Indonesia pada umumnya. Dengan kata lain, dengan adanya ketidakseimbangan Yin dan Yang secara sosial, mereka adalah sebuah komunitas yang abnormal.

Akan tetapi dengan dicabutnya Inpres No. 14/167 dan diganti dengan Keppres No. 6/2000 di masa Gus Dur, maka kanal kebudayaan pun dibuka. Mereka mulai menatap Yang: secercah sinar yang memberi kehangatan dan harapan akan berubahnya kondisi sosial mereka yang abnormal itu, dan bersemangat dalam mengekspresikan unsur-unsur kebudayaan yang mereka miliki yang selama ini dipaksa untuk dipendam dan ditutup dalam-dalam. Tradisi Peh Cun merupakan salah satu ‘cahaya’ Yang itu. Dengan penuh semangat mereka mulai merekonstruksi dan mengeskpresikan kebudayaan mereka, walau berjalan tahap demi tahap. Di dalam Yin yang miskin itu mereka menemukan Yang di dalam sikap yang lebih positif, memiliki rasa percaya diri, dan antusiasme yang tinggi. Sikap ini juga terekspresi dalam kostum dan segala pernak-pernik yang mengiringi festival balap perahu.

Dengan dibukanya kanal kebudayaan ini, mereka mulai memperkenalkan festival balap perahu secara terbuka, disaksikan ribuan orang di pinggir sungai Cisadane. Mereka tidak lagi menutup diri. Dengan bangga mereka memperlihatkan kepala naga di perahu mereka sebagai Yang: bahwa mereka komunitas yang perkasa dan tangguh seperti halnya para leluhur, yang berani menyatakan inilah “Peh Cun” dan bukan sekadar balap perahu biasa di sungai, inilah Tionghoa Benteng yang perkasa, yang selama berabad-abad dianiaya, direndahkan, dan dimarjinalkan, namun masih bisa menyatakan eksistensi dirinya, masih bisa menyatakan diri bahwa mereka adalah “keturunan naga”. Qi Yang telah membuat mereka berani untuk bangkit menyatakan siapa mereka sesungguhnya.

Pola-pola ritme (Pola I, Pola II, dan Pola III) dalam tambur Peh Cun merupakan simbol perjuangan dalam mencapai keseimbangan sosial. Dipukulnya tambur dengan menggunakan energi mengindikasikan bahwa qi sosial mulai tumbuh. Tambur Peh Cun tidak lain adalah meridian dalam tubuh sosial yang berfungsi menyalurkan qi Yang agar kondisi sosial mereka

terangkat dari dominasi qi Yin. Pola I yang bertempo lambat menggambarkan kondisi sosial yang Yin, namun perlahan tapi pasti, dengan didayungnya perahu, mereka mulai mengerahkan qi Yang dan “sang naga” pun mulai menggeliat.

Pada Pola II, yang “pola race”, yang bertempo cepat, penuh energi dan semangat, qi Yang terekspresi mencapai puncaknya. Inilah gambaran “sang naga” dengan segala kekuatan dan keperkasaannya membelah arus Cisadane. Tempo yang cepat dan bersemangat ini juga menggambarkan perjuangan qi Yang dalam menemukan keseimbangannya, semangat dalam meninggalkan kondisi abnormal: sebuah *recovery* setelah mengalami kondisi tubuh sosial yang “sakit” dan lemah. Bunyi tambur dan gembeng yang menggelegar adalah getaran qi yang bergerak ke seluruh tubuh sosial guna mencapai finish, yakni keseimbangan tubuh sosial yang ditandai oleh keseimbangan qi Yin dan qi Yang. Tempo cepat, penuh energi dan semangat ini dari perspektif teori Yin-Yang disebut sebagai “upaya penguatan”: kondisi qi yang lemah dikuatkan oleh qi Yang agar seimbang.

Pada Pola III, yakni “Pola Kemenangan”, tempo berlangsung sedang. Seperti dikatakan di dalam teori Yin-Yang, kondisi “sehat” terjadi ketika kondisi qi Yin tidak terlalu lemah, dan qi Yang tidak terlalu kuat. Hal itu berlaku pula bagi “tubuh sosial”. Tempo tambur dan gembeng yang sedang (*andante*) menggambarkan bahwa kondisi tubuh sosial telah seimbang atau “sehat”. Kondisi yang sehat ditandai dengan suasana yang agung. Hal ini menggambarkan bahwa qi Yin dan qi Yang telah berada pada posisi yang seimbang. Keseimbangan sosial inilah yang diharapkan dan dicita-citakan selama beratus-ratus tahun.

Jika pola-pola ini (Pola I, Pola II, dan Pola III) dibuat bagan maka akan terbentuk skema: lambat (Yin)—cepat (Yang)—sedang (keseimbangan antara Yin dan Yang). Perjalanan dari kondisi Yin menuju kondisi Yang adalah sebuah perjuangan, dan perjalanan dari kondisi Yang menuju kondisi Yin merupakan penyesuaian. Secara sosial, tambur *Peh Cun* telah menggambarkan upaya perjuangan dan penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Benteng. Mereka telah berusaha dan berjuang keras untuk mencapai persamaan hak dan kewajiban dan keadilan sebagai warga negara Indonesia, berusaha menyesuaikan diri dengan cara pandang masyarakat secara umum, dan siap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.

Kesimpulan

Tambur *Peh Cun* dalam Festival Perahu Naga bukanlah sekadar urusan balap perahu, hiburan atau kesenian biasa. Makna yang terkandung di dalam kesenian ini bersifat menyejarah dan ideologis yakni sejarah kelim komunitas Tionghoa Benteng secara khusus, sehingga sampai sekarang mereka menjadi miskin dan tersisih. Makna ideologis itu dapat terlihat dalam pola-pola ritme di dalam tambur *Peh Cun* yang secara simbolis mengungkapkan cita-cita, harapan, dunia batin, dan eksistensi masyarakat ini. Inilah sebuah bentuk “*pasemon*”: sebuah upaya mengungkapkan sesuatu, namun tidak diungkapkan secara tersurat. Upaya ini ditempuh karena tidak memungkinkan bagi masyarakat ini untuk bersikap frontal, mengingat adanya luka-luka sosial di masa silam yang sangat sulit untuk dilupakan, apalagi disembuhkan. Namun demikian, di sinilah peran karya seni. Ia mampu mengekspresikan dan mengeksplorasi persoalan-persoalan substansial melalui media estetis, dan kehadiran tambur *Peh Cun* telah membuktikan hal itu.

Referensi

- Akbar, M. B., & Darmawan, W. (2022). Pendidikan Multikultural Melalui Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Kreatif. In *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* (Vol. 8, Issue 1, pp. 92–98). Dinas DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i1.449>
- Chen, Guo-Ming. (2018). A Yin-Yang Theory of Human Communication. *China Media Research*, 4(4), 1-15.
- Christian, S. A. (2017). Identitas budaya orang tionghoa Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 1(1), 11–22.
- Chunjiang, F. (2002). *Origins of Chinese Names*. Asiapac Books Ltd.
- Dharmowijono, W. (2013). Daradjadi, Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa melawan VOC. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013, xliii+ 292 pp+ 1 loose leaf. ISBN 9789797096878. Price: IDR 63,000.00 (paperback). *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 169(2–3), 375–377.
- Efferin, S., & Pontjoharyo, W. (2006). Chinese Indonesian business in the era of globalization: Ethnicity, culture and the rise of China. *Southeast Asia's Chinese Businesses in an Era of Globalization: Coping with the Rise of China, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore*, 102–160.
- Fang, T. (2012). Yin Yang: A new perspective on culture. *Management and Organization Review*, 8(1), 25–50.
- Gopalakhrisnan (2013). Simple fuzzy logic-based modeling of Yin-Yang theory and five-element theory in Chinese traditional medicine. *AU Journal of Technology*, 7(1), 21-30.
- Han, Bing (2020). Gothic Writing Technique and Yin-Yang Theory in The Fall of the House of Usher. *Journal of Language Teaching and Research*, 11(2), 288-292.
- Hetherington, M. (2014). *The Yin & Yang Lifestyle Guide*. Mind Heart Publishing.
- Hidayatullah, R. (2020). Kreativitas Dalam Pendidikan Musik: Berpikir Divergen Dan Konvergen. *Musikolastika*, 2(1), 1–7.
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), 85–93.
- Kusumohamidjojo, B. (2010). *Sejarah Filsafat Tiongkok*. Jalasutra.
- Lewis, O. (1998). *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2005). *Chinese Indonesian: Remembering, Distorting, Forgetting*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Lohanda, M. (2007a). *Sejarah para pembesar mengatur Batavia*. Masup Jakarta.

- Lohanda, M. (2007b). Tragedi Seorang Kapitan Cina. Dalam Hoetnik, Ni Hoe Kong, Kapitein Tiong Hoa Di Betawi Dalem Tahon, 1740.
- Mann, F. (1964). *The Meridians of Acupuncture*. William Heinemann Medical Book, Ltd.
- Meyer, P. K. (2021). Indonesian Weberian social stratification: The case of Tionghoa-Pribumi inter-ethnic relations. In *International Journal on Minority and Group Rights* (Vol. 28, Issue 2, pp. 247–279). <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10022>
- Ming, H. S. (1964). *Kumpulan Kuliah-kuliah Akupunktur*. Bagian Akupunktur Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusum.
- Mulder, N. (2000). *Indonesian Images: The Culture of the Public World*. Kanisius.
- Mutia, R. T. N. (2019). The Tionghoa's position in the history of Indonesia-China relations from 1950 to 1998: When two countries "honour" is at stake. *International Journal of China Studies*, 10(1), 47–62. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85078443928
- Nasir, M. S. G. (2021). Peh Cun. In M. H. Sasongko, Supriyadi, & Sunarto (Eds.), *Ensiklopedia Musik Nusantara*. Abdiel Press.
- Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Purwanto, E. (2012). *Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng*. Program Pascasarjana Studi Pembangunan, UKSW.
- Rosyadi. (2010). Menelusuri Tradisi Etnis Cina di Kota Tangerang. *Patanjala*, 2(1).
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Trans Media Pustaka.
- Srimulyani, E., Afriko, M., Arskal Salim, M., Nur Ichwan, M., Meyer, P. K., Mulyani, & Mutia, R. T. N. (2019). DIASPORIC CHINESE COMMUNITY IN POST-CONFLICT ACEH : Socio-Cultural Identities and Social Relations with the Acehese Muslim Majority. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(2), 47–62. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.395-420>
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tjwan, G. G. (2008). *Desa Dadap: Wujud Bhinneka Tunggal Ika*. Elkasa.
- Wang, Robin R. (2005). Dong Zhongshu's Transformation of "Yin-Yang" Theory and Contesting of Gender Identity. *Philosophy East and West*, 55(2), 209-231.
- Xiaoxiang, L. (2001). *Origins of Chinese People and Customs*. Asiapac Books, Ltd.
- Xie, Lidong, et al, (2021). Research on the Development Path of "Yin Yang and Five Elements" Cultural Creative Products Based on Cross-border E-commerce. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 543, 953-959.